

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan Ross (1973) sedangkan pengembangan secara teoritis dilakukan oleh Jansen dan Meckling (1976). Konsep teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas sebagai upaya dalam memenuhi kepentingan principal. Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (2008) dan Pohan dan Mulyani (2017), teori keagenan merupakan sebuah gagasan tentang pengendalian organisasi berdasarkan pada pemisahan kepemilikan dengan manajemen untuk meminimalkan potensi kepentingan pemilik terabaikan.

Asumsi teori agensi menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan dapat menyebabkan masalah agensi. Pemilik perusahaan akan memberi wewenang kepada manajer untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan membuat keputusan perusahaan lain untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Namun akan ada kemungkinan akan kinerja manajer yang tidak bertindak atas kepentingan pemilik (Hamdani, 2016). Dalam teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer sulit terwujud dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Permasalahan yang muncul dari hubungan principal dengan agent inilah yang dinamakan masalah keagenan (*Agency Problem*). Terdapat dua jenis agency problem, yaitu:

1. Permasalahan antara principal dengan agent
2. Permasalahan antara principal dengan kreditur.

Permasalahan pertama muncul disebabkan ketika manajer sebagai agent tidak selalu dapat membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal, yaitu memaksimalkan kekayaan atau kesejahteraan pemegang saham. Hal ini karena manajer sebagai agent cenderung untuk mengejar kepentingan pribadi yang berfokus pada pengerjaan proyek-proyek yang mendatangkan keuntungan dengan menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dibandingkan dengan upaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Selain itu, masalah ini juga memunculkan ketidaksetaraan informasi (*assymetric information*) karena pihak manajer berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak akan kondisi perusahaan yang dikelolanya dibandingkan dengan pemilik perusahaan.

Permasalahan kedua ketika struktur modal perusahaan yang terdiri dari modal saham maupun yang berasal dari dana utang jangka. Hal ini terjadi ketika membahas aturan kontrak utang dalam konteks lembaga, maka manajer diasumsikan sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan yang benar-benar selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam masalah keagenan yang kedua, principal adalah kreditur yang memberikan utang kepada perusahaan yang diwakili oleh manajer sebagai agent yang bertindak atas nama pemegang saham atau pemilik perusahaan (Sumiati dan Indrawati, 2019).

Dalam mengatasi *Agency Problem*, maka Jensen dan Macklin (1976) mengusulkan adanya *Agency Cost* yaitu biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengawasi perilaku manajer. Terdapat tiga jenis *Agency Cost*, yaitu:

1. *Monitoring cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi, mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent.

2. *Bonding cost*, yaitu biaya yang justru ditanggung manajemen (*agent*) untuk dapat mematuhi dan menetapkan mekanisme untuk menunjukkan bahwa agent telah berperilaku sesuai dengan kepentingan principal.
3. *Residual cost*, yaitu penurunan kesejahteraan principal sebagai dampak adanya perbedaan keputusan agent dengan keputusan principal.

2.1.2 Teori Good Corporate Governance

Teori ini menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional (*agent*) dalam menjalankan bisnis setiap hari. Tujuannya adalah agar pemilik perusahaan mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan efisiensi biaya dan dikelola oleh para profesional. Secara umum, tujuan manajemen dan pemegang saham biasanya tidak berbeda. Keduanya bertujuan untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan harga saham perusahaan. Namun, dalam situasi tertentu ada juga kepentingan yang berbeda, yang solusinya sering lebih menguntungkan bagi manajemen. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terdapat enam prinsip-prinsip corporate governance yaitu kerangka dasar corporate governance yang efektif, hak pemegang saham dan fungsi utama kepemilikan saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan pemangku kepentingan dalam *corporate governance*, keterbukaan dan transparansi, dan peran tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris (Rahmawati, 2017).

Sedangkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN disebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang dimaksud meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Penerapan GCG dalam perusahaan sebagai kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan akan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check and balance di perusahaan. FCGI (2018) menjelaskan bahwa dengan menerapkan corporate governance pada perusahaan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan pemegang saham untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak manajer sebagai agent yang dipercayakan mengelola perusahaan.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan bagi pemangku kepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.1.3 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip – prinsip GCG. Kehadiran dewan komisaris dalam perusahaan ialah salah satu pilar pada mewujudkan tata kelola perusahaan yg baik serta sebagai bentuk pengawasan yg dilakukan pihak principal didalam mengawasi agent. di Indonesia sendiri dewan komisaris memakai sistem taraf 2 atau *Two Tiers System* dimana perusahaan memiliki 2 badan terpisah, yaitu dewan komisaris menjadi dewan pengawas serta dewan direksi menjadi dewan manajemen (FCGI, 2006). Peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris akan memberikan kekuatan didalam pengawasan terhadap manajer yang bisa disesuaikan dengan masalah yang sedang perusahaan hadapi serta bisa berhemat porto. Monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris lebih memberikan kelebihan daripada pengawasan yang dilakukan oleh corporate control (Utomo, 2019).

Keanggotaan dewan komisaris meliputi komisaris yang terafiliasi dan komisaris yang tidak terafiliasi atau yang dikenal dengan komisaris independen. Komisaris independen adalah bagian asal anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan usaha juga korelasi kekeluargaan menggunakan pemegang saham pengendali, menggunakan anggota direksi juga dengan dewan komisaris dalam perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Kata independen di komisaris independen tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa dewan komisaris yang lain tidak berlaku independent, tetapi kata independen memberikan arti bahwa eksistensi dewan

komisaris independen menjadi wakil berasal dari pemegang saham minoritas termasuk mewakili kepentingan lainnya. Contohnya investor, saat ini hampir semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mempunyai direktur independen serta komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan.

Namun demikian, masih ada beberapa perusahaan publik yang belum mengetahui arti pentingnya kiprah komisaris independen dalam rangka implementasi Good Corporate Governance, bahkan masih ada yang mempunyai anggapan bahwa keberadaan komisaris independen pada perusahaan public hanya menjadi pelengkap sekedar memenuhi regulasi yang berlaku. Keberadaan direktur dan komisaris independen memegang peranan penting pada rangka implementasi GCG. Pihak regulator (BEI) hendaknya melakukan penilaian serta pengawasan secara periodik buat meyakinkan bahwa aplikasi dewan komisaris independen sudah sesuai menggunakan ketentuan yang berlaku.

Lemahnya penerapan GCG dan pengawasan dewan komisaris serta terlalu besarnya kekuasaan eksekutif sudah sebagai bagian penyebab tumbangannya perusahaan-perusahaan yang ada. Selain itu lemahnya supervisi terhadap manajemen juga diindikasikan menjadi keliru satu penyebab krisis finansial pada Asia termasuk pada Indonesia. Sebab itu, pemberdayaan komisaris menggunakan memperkenalkan komisaris independen dibutuhkan sebagai penggerak GCG.

Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama menggunakan anggota dewan komisaris lainnya, yakni menjadi badan pengawas serta pemberi nasihat kepada dewan direksi. Ada pun yang membedakannya adalah bahwa komisaris independen dari UU No 40 Tahun 2007 Pasal 120 ayat dua UU PT adalah asal usul kalangan luar perusahaan tidak terafiliasi menggunakan pemegang saham primer, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Kehadiran komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi serta diterapkan dengan baik yaitu buat memastikan transparansi serta keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lain yang diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara

wajar serta adil, kepatuhan perusahaan di perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mengklaim akuntabilitas organ perusahaan.

Komisaris independen juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil direksi pada mengelola perusahaan dimana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara serta lumrah kepada pemangku kepentingan sinkron manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk pada pemegang saham minoritas sehingga prinsip kewajaran serta kesetaraan (fairness) bisa terealisasi menggunakan baik.

2.1.4 Komite Audit

Komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah dewan komisaris, yang di bentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan , sistem pengendalian internal dan external .Dalam melakukan fungsi pengawasannya komisaris dibantu oleh beberapa komite seperti komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 menjelaskan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dalam Pasal 10 POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite audit berperan dalam mewujudkan good corporate governance (GCG) dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan, serta keberadaan komite audit yang efektif juga merupakan salah satu aspek penilaian implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG, maka prinsip independensi (*indepedency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

2.1.5 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar perusahaan yang akan memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Menurut Brigham dan Houston (2014) mengatakan jika ingin memaksimalkan nilai suatu perusahaan, maka harus memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang ada pada suatu perusahaan tersebut. Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga, selain ditunjukkan melalui asset yang dimiliki perusahaan nilai perusahaan juga tercermin melalui nilai pasar saham sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012).

Nilai perusahaan merupakan hal yang penting bagi suatu emiten, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka dapat dikatakan perusahaan mampu memakmurkan para pemegang sahamnya (Brigham dan Houston, 2014). Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan bagi para pemilik perusahaan, karena semakin tingginya nilai perusahaan maka akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen perusahaan mampu memberikan nilai yang maksimum pada saat perusahaan tersebut masuk ke pasar. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Pengukuran Nilai Perusahaan menurut Weston dan Copelan (2004) dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari:

a. *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Brigham & Ehrhardt (2017) Price Earnings Ratio “*Calculated by dividing price per share by earnings per share. This shows how much investors are willing to pay per dollar of reported profits.*” PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{laba perlembar saham}}$$

b. Price to Book Value (PBV)

Menurut Brigham & Ehrhardt (2017) *Price to Book Value* adalah “*The stock price per share (the market value per share) divided by the book value per share; alternative, the total market value of equity divided by the total common equity reported on the balance sheet. Show how much current shareholders value the firm relative to the total cumulative amount of cash the firm has raised from shareholders either directly through stock issuances or indirectly by reinvesting net income rather than paying it all out as dividends*”.

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadiano, 2001). Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Nilai buku saham}}$$

c. Tobin's Q

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q ini dikembangkan oleh professor James Tobin pada tahun 1969. Inti teori ini adalah cara kebijakan moneter memengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya pada penilaian ekuitas. Tobin's Q merupakan perbandingan nilai pasar perusahaan dengan investasi bersihnya, jika harga saham meningkat maka nilai pasar perusahaan juga akan mengalami peningkatan (Fauziah, 2017). Rumus untuk menghitung Tobin's Q adalah:

$$Tobin's\ Q = \frac{\text{Total Market Value of Firm}}{\text{Total Assets Value of Firm}}$$

Total market value of firm merupakan nilai kapitalisasi pasar yang diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (*closing price*) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Sedangkan total assets value of firm diperoleh dari nilai total asset yang dimiliki perusahaan baik assets lancar maupun asset tetap. Interpretasi nilai Tobin's Q yaitu:

1. Tobin's $Q < 1$, menunjukkan bahwa perusahaan akan menarik bagi investor potensial daripada membuat perusahaan yang serupa. Hal ini kemungkinan besar akan menghasilkan peningkatan harga saham pada perusahaan sehingga akan meningkatkan rasio Tobin's Q
2. Tobin's $Q = 1$, menunjukkan bahwa saham dalam kondisi average. Artinya manajemen stagnan dalam mengelola aktiva dan potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.
3. Tobin's $Q > 1$, menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh tingkat yang lebih tinggi daripada biaya penggantian yang menyebabkan perusahaan lain akan membuat perusahaan serupa. Ini akan menurunkan pangsa pasar perusahaan lalu menurunkan harga pasarnya sehingga nilai Tobin's Q turun.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dahlia Eka (2018) tentang "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan direksi independen dan komite audit mempengaruhi nilai perusahaan, dimana kualitas laba sebagai intervensi variable. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba adalah bukan merupakan variable intervening dalam kaitannya dengan mekanisme corporate governance terhadap nilai perusahaan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nuryono, et al., (2019) tentang “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Komisaris Independen, Komite Audit, serta Kualitas Audit pada Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KI), komite audit (KA) dan kualitas audit (KuA) terhadap nilai emiten pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Sampel penelitian terdiri dari 63 emiten dan dipilih secara purposive sampling (dengan kriteria tertentu). Analisis data menggunakan analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan institusional (INST), komisaris independen (KI), komite audit (KA) dan kualitas audit (KuA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). Secara parsial, kepemilikan institusional yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variable bebas lainnya (kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Onasis dan Robin (2016) tentang “Pengaruh Rapikan Kelola perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini merupakan buat menguji pengaruh rapikan kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan Tobin’s Q sebagai pengukur nilai perusahaan. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi dengan melihat laporan keuangan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Sedangkan

penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data ini diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 21.00. contoh yang dipergunakan dalam menganalisis data merupakan regresi linier berganda yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, serta uji heterokedastisitas. hasil penelitian membagikan bahwa terdapat efek signifikan positif antara berukuran dewan direksi, dewan independen, komite audit, rapat komite audit, leverage, dan ROA terhadap nilai perusahaan. Saran akibat penelitian ini bagi perusahaan supaya menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan sesuai menggunakan peraturan yang terdapat buat semakin meningkatkan nilai perusahaan. Saran bagi peneliti selanjutnya supaya menambah jumlah sampel penelitian dengan memperluas objek penelitian pada sektor keuangan pada negara lain, memperpanjang periode penelitian melalui penambahan periode pengamatan sehingga hasil yg diperoleh lebih akurat dan memperbanyak variabel yg digunakan menjadi proksi berasal rapikan kelola perusahaan supaya menerima hasil penelitian yg akurat mengenai dampak prosedur rapikan kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Pohan dan Dwimulyani (2017) tentang “Dampak kinerja keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan di perusahaan pertambangan pada Indonesia Bursa dampak Indonesia”. Penelitian ini menguji dampak kinerja keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility pada nilai perusahaan di perusahaan pertambangan pada Indonesia Bursa dampak Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling. Data pada analisis menggunakan regresi berganda analisis dengan SPSS versi 22. Variabel independen pada penelitian ini artinya kinerja perusahaan yang terdiri asal Return on Asset serta Debt to Equity, GCG diproyeksikan menggunakan berukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan jumlah komite audit serta Corporate Social Responsibility. Sedangkan variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang pada ukur memakai *Price to Book Value*. Akibat penelitian ini membagikan

bahwa Return on Asset, ukuran dewan komisaris, dan independensi dewan komisaris mempunyai efek positif & signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Debt to Equity Ratio, jumlah komite audit dan *Corporate Social Responsibility* memiliki dampak positif & tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan serta kelemahan yaitu hanya menggunakan 15 perusahaan pertambangan saja menggunakan periode yang singkat (2004-2016) serta jumlah variabel yg sedikit. Saran buat peneliti selanjutnya agar menggunakan sampel penelitian pada sektor lain, memperpanjang periode penelitian, menambah variabel, memakai kriteria pengukuran variabel yang lebih eksplisit seperti Balance Score Card serta memakai kriteria pengukuran variabel CSR lainnya mirip GRI G2, GRI G3 atau ISO 26000

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Oktaria, Mela, dan Zarefar (2018) tentang “Efek Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah buat menilai efek Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan Price Book Value (PBV). Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan pada Jakarta Islamic Index sebesar 30 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, ada 15 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index pada 2012-2016 yang memenuhi kriteria sampel. Data dianalisis dengan memakai regresi berganda. akibat penelitian ini menyatakan bahwa Dewan Komisaris independen tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Komite audit memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan. penelitian ini memiliki keterbatasan dengan jumlah sampel yang menjadi objek penelitian masih terlalu sedikit, sehingga ilustrasi hasil penelitian ini tidak menyajikan situasi umum yang terjadi pada Jakarta Islamic Index, peneliti tidak memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan mirip dilema politik, sikap investor, sentimen pasar serta lain-lain, dan penelitian ini hanya menggunakan *Price Book Value* (PBV) buat mengukur nilai perusahaan sementara poly komponen lain yang dapat dipergunakan pada mengukur nilai perusahaan, contohnya, *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), *Net Profit Margin*

(NPM). Penelitian ini menyampaikan saran bagi penelitian kedepannya supaya memperluas sampel penelitian, membarui variabel independen lain yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan dan memakai rasio keuangan lainnya buat mengukur nilai perusahaan.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Agyemang-Mintah dan Schadewitz (2018) tentang “Dampak adopsi Komite Audit pada nilai lembaga keuangan di Inggris dan juga meneliti dampak pendirian komite audit terhadap nilai perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak adopsi Komite Audit pada nilai lembaga keuangan di Inggris dan juga meneliti dampak pendirian komite audit tentang nilai perusahaan selama era krisis keuangan global sebelum dan sesudah krisis. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan 63 perusahaan selama periode 12 tahun (dari Desember 2000 hingga Desember 2011). Variabel independen penelitian ini yaitu informasi komite audit sedangkan variabel dependen diukur menggunakan Tobins Q. Hasil penelitian ini menunjukkan selama periode pra-krisis pembentukan komite audit memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap nilai perusahaan. Namun pembentukan komite audit pasca-krisis menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki statistik hubungan yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan ditemukannya bukti bahwa setelah krisis keuangan tahun 2009, seluruh ekonomi Inggris masih mengalami efek dari kemerosotan ekonomi. Peneliti melihat bahwa penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dengan pembentukan komite audit akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan respons pemegang saham. Juga akan meningkatkan tanggung jawab pengawasan dewan direksi, meningkatkan sistem manajemen risiko perusahaan dan kualitas audit. Sedangkan bagi regulator, akan mendorong di dalam pembuatan prosedur komite audit yang kuat. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya meneliti lembaga keuangan Inggris saja sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan secara luas pada ekonomi lainnya. Saran bagi penelitian selanjutnya supaya menggunakan sektor lainnya misalnya sektor manufaktur industri untuk melihat dampak Komite audit sebelum dan sesudah krisis, serta melihat pada efek pembentukan komite audit terhadap komposisi dewan direksi.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh sang Damayanthi (2019) tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan”. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. citra perusahaan yang baik sangat dipengaruhi melalui nilai perusahaan yang dihasilkan. Semakin baik nilai perusahaan akan menghipnotis taraf kepercayaan investor buat melakukan investasi, sesuai fenomena serta teori maka faktor yg mempengaruhi nilai perusahaan artinya pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang diproksikan dengan menggunakan komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusi, serta kepemilikan manajerial dan Kepemilikan asing (KA). Tujuan penelitian artinya memberikan bukti empiris bahwa pengungkapan CSR, GCG serta KA mensugesti nilai perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Impak Indonesia tahun 2015-2017. Sampel merupakan perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Dampak Indonesia. menggunakan metode nonprobability sampling, khususnya purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi linier berganda. yang akan terjadi penelitian ini membagikan faktor yang menghipnotis nilai perusahaan merupakan pengungkapan CSR, GCG serta KA yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu nilai R^2 yang mungil kurang asal 50% yang ialah masih poly variabel lain yang mensugesti nilai perusahaan sehingga perlu dicari fenomena lain lainnya yang bisa mensugesti nilai perusahaan. Saran asal hasil penelitian ini bagi perusahaan agar menaikkan pengungkapan CSR yg masih sangat kurang baik pada Indonesia, dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah dengan konsisten melakukan pengungkapan CSR sebagai akibatnya memberikan rangsangan bagi perusahaan lainnya buat mengatakan CSR. Penelitian ke depan buat memakai proksi lainnya yang terdapat dalam mekanisme GCG sehingga mampu membuat hasil yang lebih baik.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh sang Alqatamin (2018) tentang “imbas ciri komite audit terhadap kinerja perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat imbas ciri komite audit terhadap kinerja perusahaan. Sampel terdiri dari 165

perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Amman Stock Exchange (ASE). Studi ini mengadopsi periode 3 tahun dari tahun 2014 hingga 2016 menjadi pembentukan komite audit menjadi wajib dari tahun 2013, seluruh data yang berkaitan dengan variabel penelitian dikumpulkan berasal laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan di tahun 2014-2016 akibat penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi dan keragaman gender mempunyai korelasi positif yang signifikan menggunakan kinerja perusahaan, sedangkan pengalaman dan frekuensi pertemuan mempunyai hubungan yang tidak signifikan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan sampel di perusahaan non keuangan saja sehingga tidak bisa dipergunakan ke negara lain. Penelitian ini memberikan saran kedepannya buat serius pada sektor keuangan yang memegang peranan krusial pada menyebarkan ekonomi, menggunakan ciri komite audit pada mempengaruhi faktor lain seperti nilai perusahaan, pengungkapan serta memperhatikan hubungan antara ciri komite audit dan kinerja perusahaan pada antara perusahaan keluarga dan non-famili, sebab sebagian perusahaan pada Yordania dimiliki oleh keluarga sehingga mengeksplorasi persoalan ini dapat berkontribusi akbar pada perkembangan literatur komite audit.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Widya Kusuma Wardhani (2021) dalam penelitian ini perusahaan adalah lembaga yang dijalankan untuk menyediakan barang untuk mencapai laba yang tinggi. Manajemen perusahaan yang perusahaannya ingin tetap eksis maka dari itu perusahaan selalu mencari strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nilai perusahaan itu point utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor untuk menginvestasikan dana nya ke sebuah perusahaan proksi good corporate governance yang di pakai dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan komite audit proksi yang pertama adalah dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan memiliki tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan wejangan kepada direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan good corporate governance dengan baik. Gap research dalam penelitian ini mengatakan adanya dewan komisaris yang efektif akan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan maka dari itu nilai perusahaan akan meningkat, sedangkan

dewan komisaris dapat menurunkan nilai perusahaan. proksi kedua adalah komite audit memiliki keahlian dan independensi yang memadai bisa membantu dewan komisaris mengawasi proses pelaporan keuangan mengawasi auditor external dan mengecilkan adanya konflik keagenan. Gap Research menyatakan citra perusahaan dapat tercermin dari kualitas komite audit yang baik sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian menyatakan dewan komisari yang di ukur dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, penelitian ini juga menyatakan bahwa komite audit dengan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Pembentukan Dewan komisaris juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak principal sebagai pemilik perusahaan didalam mengawasi manajer sebagai agent didalam mengatasi teori Keagenan. Karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga memantau efektivitas praktik good corporate governance yang diterapkan perseroan serta melakukan penyesuaian bila mana diperlukan.

Dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dan komisaris yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan menjadi sangat penting sebagai wakil dari pemegang saham minoritas. Dengan meningkatnya efisiensi dan daya saing perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan semakin memakmurkan para pemegang saham (Brigham dan Houston, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vera, Mela, dan Zarefar (2018) menyatakan

bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Pohan dan Dwimulyani (2017) juga menyatakan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan serta penelitian Onasis dan Robin (2016) juga menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit dibentuk sebagai organ perusahaan yang membantu dewan komisaris didalam menjalankan fungsinya. Komite Audit harus mampu bersifat independen dan tidak terlibat dengan manajemen-manajemen perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melakukan fungsi pemantauan secara efektif. Kehadiran komite audit bertujuan untuk menjaga integritas, objektif dan perspektif dalam laporan keuangan yang dibuat

Komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya (Onasis & Robin, 2016). Dengan begitu maka pengelolaan laporan yang dilakukan pihak manajer sebagai agent akan meningkatkan nilai perusahaan bagi pihak pemegang saham. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirawati Pohan dan Dwimulyani (2017) yang menyatakan bahwa keberadaan jumlah komite audit dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan begitu juga penelitian menurut Onasis dan Robin (2016) dimana komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan penelitian Isti'adah (2015) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

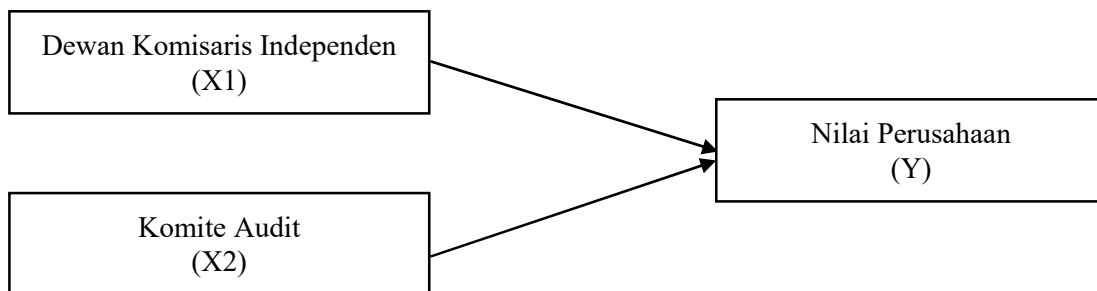
Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yaitu:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan

H2 : Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan kerangka penelitian atau kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian